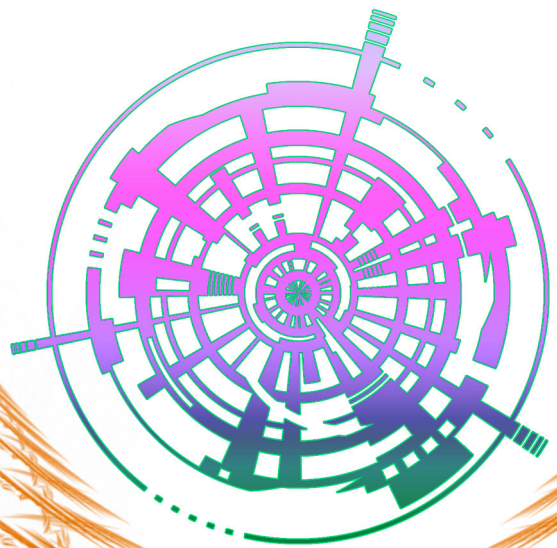




**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2021**



BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan PD periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Renstra PD berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang ada, memperhatikan peluang dan kendala yang mungkin timbul untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis regional dan nasional.

Badan Penghubung Provinsi NTB telah memiliki Renstra Tahun 2019-2023 yang berfungsi sebagai alat ukur pengawasan atas kerja dan kinerja tahunan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan muatan pada Renstra, dilakukan evaluasi secara periodik atas capaian Badan Penghubung untuk kemudian diambil langkah-langkah perbaikan kinerja ke depannya.

Pelaksanaan Renstra Badan Penghubung Provinsi NTB Tahun 2019-2023 telah berlangsung selama dua tahun, namun dengan adanya berbagai dinamika yang terjadi seperti revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2019-2023, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Program Strategis dan Unggulan Daerah Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, serta munculnya wabah Pandemi COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) maka dilakukan penyesuaian terhadap berbagai indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan revisi Renstra tersebut diharapkan tugas Badan Penghubung Daerah sebagai unit pelaksana dari Pemerintah Provinsi NTB yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan, serta sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan swasta di Jakarta dapat lebih optimal. Selain itu, Badan Penghubung Daerah sebagai salah satu perangkat daerah yang mendukung pencapaian misi kedua RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-

2023 yaitu “NTB Bersih dan Melayani melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi” dapat menghasilkan kondisi kerja yang kondusif berbekal tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen revisi Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114).

8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023.
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2017 tentang Program Strategis dan Unggulan Daerah Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan revisi Renstra ini sebagai penjabaran RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah 3 (tiga) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan revisi Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB sebagai berikut:

1. Pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah.
2. Landasan rencana kerja tahunan Badan Penghubung Daerah.
3. Bahan acuan penilaian kinerja Badan Penghubung Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Revisi Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 -2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Memuat tugas dan fungsi serta struktur organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB, sumber daya, kinerja pelayanan Badan Penghubung Daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penghubung Daerah, telaahan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat visi, misi dan sasaran, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penghubung Daerah, serta strategi dan kebijakan dalam pencapaian visi misi tersebut.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan kebijakan dalam mencapai tujuan sasaran Badan Penghubung Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

.

BAB VIII PENUTUP

Memuat ringkasan revisi Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENGHUBUNG DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB di Jakarta memiliki tugas sebagai unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan lembaga-lembaga negara, perwakilan-perwakilan negara, dan lembaga-lembaga lainnya yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Badan Penghubung Daerah sebagai unit pelaksana dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan, serta sebagai penghubung antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah, dan swasta di Jakarta. Maka dalam pelaksanaannya Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB melaksanakan fungsi pelayanan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan swasta di Jakarta berupa pelaksanaan koordinasi dengan Lembaga Kementerian atau Lembaga Non Kementerian sebagai tindak lanjut dari permintaan audiensi dari pejabat daerah NTB.
2. Pengkoordinasian dan pembinaan masyarakat daerah di Jakarta, berupa fasilitasi kegiatan dialog antara pejabat daerah, tokoh masyarakat NTB dengan mahasiswa atau masyarakat rantau NTB yang ada di Jakarta.
3. Pelayanan warga terlantar berupa, koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pemulangan warga NTB yang terlantar/TKI/mahasiswa NTB di luar negeri yang terlantar, kemudian menyiapkan akomodasi dan memulangkan ke daerah.
4. Pelayanan pejabat dan tamu VVIP dan VIP berupa melaksanakan penjemputan, pendampingan dan kegiatan keprotokolan, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan

formal rencana kunjungan tamu VVIP dan VIP serta melaksanakan kegiatan pelayanan umum lainnya yang diperlukan pejabat VVIP dan VIP selama bertugas di Jakarta.

5. Pengelolaan wisma/mess NTB berupa, layanan kamar bagi tamu-tamu yang menginap di Wisma NTB.
6. Pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata berupa pelaksanaan promosi potensi unggulan daerah dan pentas seni budaya, baik di lingkungan TMII maupun di luar TMII.
7. Pengelolaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah berupa layanan informasi bagi pengunjung Taman Mini Indonesia Indah yang berkunjung ke anjungan daerah NTB.

Adapun ringkasan tugas dan rincian tugas pada susunan organisasi Badan Penghubung Daerah sebagai berikut:

A. Kepala Badan

Kepala Badan Penghubung Daerah bertugas menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan antar lembaga, promosi dan informasi, pelayanan serta tata usaha.

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Kepala Badan Penghubung Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan/materi dan penyusunan kebijakan strategis penghubung daerah.
2. Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis penghubung daerah.
3. Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penghubung daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penghubung daerah.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertugas menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan di bidang tata usaha.

Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan tata usaha Badan;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan asset/barang daerah serta urusan rumah tangga Badan;
3. Menyiapkan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Badan;
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidang tata usaha Badan;
5. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Badan;
6. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Tata Usaha;
7. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan tata usaha;
8. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

C. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga memiliki tugas menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan antar lembaga.

Rincian tugas Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan hubungan antar lembaga;
2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi hubungan antar lembaga dan mewakili perangkat daerah provinsi dalam melaksanakan tugas-tugas daerah tertentu di Jakarta;

3. Menyiapkan bahan fasilitasi hubungan kerja dan tugas-tugas koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan hubungan antar lembaga dengan lembaga-lembaga negara, perwakilan-perwakilan negara, lembaga-lembaga lainnya, dan masyarakat NTB di Jakarta;
4. Menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat NTB di Jabodetabek;
5. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan hubungan antar lembaga;
6. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan hubungan antar lembaga;
7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
8. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

D. Sub Bidang Promosi dan Informasi

Kepala Sub Bidang Promosi dan Informasi memiliki tugas menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Promosi dan Informasi.

Rincian tugas Kepala Sub Bidang Promosi dan Informasi sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan promosi dan informasi;
2. Menyiapkan bahan pengumpulan dan pengelolaan data potensi NTB;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan fasilitasi promosi dan penyampaian informasi potensi NTB;
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan anjungan NTB di Taman Mini Indonesia Indah (TMII);
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pementasan seni NTB;
6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan sanggar seni budaya NTB di Jabodetabek;
7. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan promosi dan informasi;

8. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan promosi dan informasi;
9. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
10. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

E. Sub Bidang Pelayanan Umum

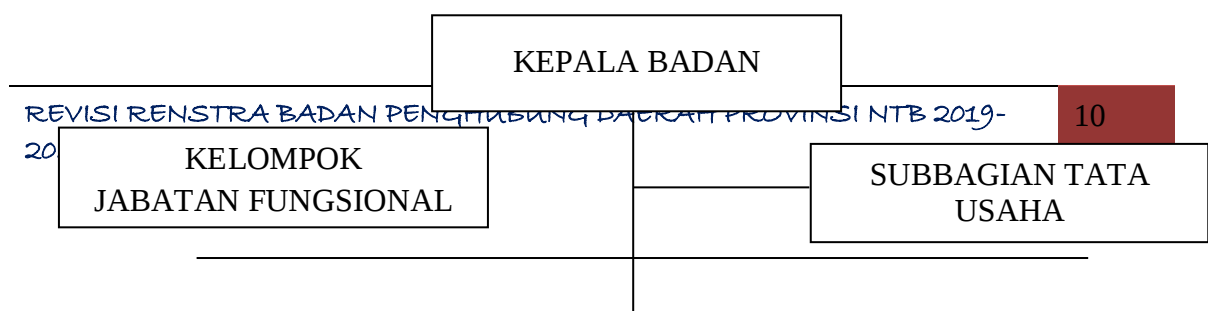
Kepala Sub Bidang Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan.

Rincian tugas Kepala Sub Bidang Pelayanan Umum sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan pelayanan;
2. Menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan kepada pejabat atau aparatur pemerintah provinsi atau anggota DPRD provinsi yang melaksanakan tugas dinas ke Jabodetabek;
3. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan pelayanan;
4. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan pelayanan;
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
6. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Penghubung Daerah dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Klasifikasi status pegawai tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Pengangkatan yang berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terkait dengan Perimbangan Keuangan Daerah. Sementara itu, Pegawai Tidak Tetap (PTT) merupakan pegawai yang pengangkatan dan hak keuangannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang diikat dengan kontrak kerja.

Jumlah pegawai di lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2020 sebanyak 65 orang, terdiri dari 38 PNS, 6 PTT dan 21 tenaga kontrak. Jumlah pegawai menurut status dan jenjang pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	1
2	Golongan III	21
3	Golongan II	15
4	Golongan I	1
5	PTT	6
6	Tenaga Kontrak	21
	Jumlah	65

Sumber : Badan Penghubung Daerah, 2020.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah
1	Magister	2	2	4
2	Sarjana	20	5	25
3	D3	-	-	-
4	SLTA/SMK	15	17	22
5	SLTP	1	2	3
6	SD		1	1
	Jumlah	38	21	65

Sumber : Badan Penghubung Daerah, 2020.

Jumlah pegawai tersebut cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB, namun pegawai dengan kualifikasi pendidikan tertentu seperti teknik atau instalasi gedung, akuntansi keuangan dan kepariwisataan masih belum memadai.

2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Badan Penghubung Daerah dilengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari aset tetap, aset lancar dan aset lainnya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Data Barang Milik Daerah (BMD)/Aset
pada Badan Penghubung Daerah**

No.	Nama Barang	Nilai
A	ASET LANCAR	
	Barang Persediaan	38.525.900
B	ASET TETAP	
1.	Tanah	86.500.000
2.	Peralatan dan Mesin	11.801.854.846
3.	Gedung dan Bangunan	14.790.330.052
4.	Aset tetap lainnya	398.287.800
C	ASET LAIN-LAIN	
5.	Aset tidak berwujud	113.591.000
6.	Aset lain-lain	770.355.120
	Jumlah	27.999.444.718

Sumber : Badan Penghubung Daerah, 2020.

Rincian aset tetap berupa peralatan dan mesin antara lain : kendaraan roda 4 (empat) 15 unit, kendaraan roda 2 (dua) 13 unit, komputer 8 unit, laptop 8 unit, monitor 2 unit dan printer 11 unit. Selain itu, Badan Penghubung Daerah juga memiliki aplikasi untuk memudahkan dalam pengecekan kamar yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Jenis Aplikasi pada Badan Penghubung Daerah

No	Nama Aplikasi	Keterangan	Alamat aplikasi
1.	e-wisma NTB	Media untuk reservasi dan pengecekan ketersediaan kamar.	

Sumber : Badan Penghubung Daerah, 2020.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah

2.3.1. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik. Badan Penghubung Daerah merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan serta penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan swasta di Jakarta. Selain memberikan

pelayanan internal kepada unsur pimpinan daerah, perangkat daerah Provinsi NTB, Badan Penghubung Daerah juga memberikan pelayanan yang bersifat eksternal kepada swasta dan masyarakat.

Tabel 2.5 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No.	Bagian	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1.	Subbag. Tata Usaha	Pelayanan tugas-tugas urusan: - Administrasi Surat menyurat - Perencanaan dan Keuangan - Perlengkapan dan lain-lain.	- Bappeda - BPKAD - BKD - Internal Badan Penghubung
2.	Subbid. Hubungan Antar Lembaga	Pelayanan Pejabat Tinggi Daerah - Memfasilitas sarana kegiatan pejabat tinggi di Pusat	- Gubernur - Wakil Gubernur - Ketua DPR - Sekda
3	Subbid. Pelayanan Umum	Pelayanan pengurus akomodasi dan transportasi kegiatan pejabat tinggi di pusat	- Gubernur - Wakil Gubernur - Ketua DPR - Sekda
4	Subbid. Promosi dan Informasi	Pelayanan publik	- Pejabat - Masyarakat

Sumber: Subbagian Tata Usaha, 2020

2.3.2. Capaian Kinerja Badan Penghubung Daerah

Pelayanan menjadi perhatian utama Badan Penghubung Daerah. Kinerja pelayanan Badan Penghubung Daerah tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Badan Penghubung Daerah
Tahun 2015-2019**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
	Layanan surat menyurat yang tersedia	500			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1	1	1	1	1
	Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan Internet yang tersedia (paket)	4 rek			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1
	Kegiatan koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	1 Tahun			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya tenaga administrasi keuangan.	7 Org			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1
	Jasa penyedia kebersihan Bahan tersedia	19 org			19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	1	1	1	1	1
	Alat tulis kantor tersedia.	1 Tahun			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Barang cetakan dan kegiatan penggandaan	1 Tahun			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sarana instalasi listrik yang terpasang	25 jenis			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	1	1	1	1	1
	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 rek			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1
	Makanan dan minuman yang disediakan	1 Tahun			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Tenaga administrasi dan teknis perkantoran tersedia	1 Tahun			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Tenaga Keamanan Kantor yang tersedia	4 Org			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1
2.	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur														0	0	0	0	0
	Peralatan gedung kantor yang dibeli	1 Tahun			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Terpenuhinya Gedung Perkantoran	1 Tahun			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Terpenuhinya jumlah kendaraan dinas/operasional	6			0	0	3	0	3	0	0	3	0	3	0	0	0	1	0
	Gedung kantor yang disewa	1 unit			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Gedung kantor yang dipelihara	3 Unit			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1
	Kendaraan dinas operasional yang dipelihara	20 Unit			18	18	20	20	20	18	18	20	20	20	1	1	1	1	1
	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	30			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1	1	1	1	1
	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur														0	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Sumber Daya aparatur yang terbina.	39 org			39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	1	1	1	1	1
3.	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD														0	0	0	0	0
	Tersusunnya laporan perencanaan dan capaian kinerja OPD	1 Dok			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Terselenggaranya kegiatan penyusunan dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
	Tersusunnya dokumen laporan akhir tahun	1 Dok			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0		1	1
4.	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD														0	0		0	0
	Tersusunnya dokumen aset BMD	1 Dok			0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0		1	1
5.	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah														0	0		0	0
	Terselenggara nya dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa & pemuda NTB yang ada di Jakarta dan sekitarnya	20			4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	0	0		1	1

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6.	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB di Jakarta														0	0	0	0	0
	Terselenggara nya kegiatan penyebaran informasi dan promosi potensi daerah Nusa Tenggara Barat di wilayah Jakarta dan sekitarnya.	40			8	8	8	0	8	8	8	8	0	8	1	1		1	0

Capaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2015-2019 telah mencapai target. Capaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan program kegiatan dengan rincian anggaran dan realisasi yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penghubung Daerah
Tahun 2015-2019

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.806.880.240	2.745.481.000	3.279.890.400	3.120.336.000	3.682.811.000	2.517.804.042	2.712.669.392	3.139.929.025	2.943.380.894	3.582.651.275	0,897	0,988	0,957	0,943	0,972	26,01	4,04
Penyediaan jasa surat menyurat	54.015.024	42.450.000	39.200.000	34.200.000	19.200.000	53.950.000	41.943.000	38.579.000	34.172.000	18.334.000	0,999	0,988	0,984	0,999	0,955		4,13
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	682.217.916	456.616.200	538.000.000	576.000.000	517.800.000	458.201.716	445.383.132	483.163.825	452.011.150	453.653.613	0,672	0,975	0,898	0,785	0,876		3,67
Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	587.036.500	559.243.800		653.678.209	-	586.045.100	559.243.800		653.357.692	-	0,998	1	-	0,999		3,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan	100.108.000	91.308.000	94.354.600	714.969.680	112.015.000	91.308.000	89.083.000	94.351.600	666.439.680	111.540.000	0,912	0,975	1	0,932	0,995		4,09
Penyediaan jasa kebersihan kantor	513.851.000	514.051.000	572.753.000	540.046.200	877.048.816	513.771.000	513.414.500	572.026.750	540.046.200	868.441.616	0,999	0,998	0,998	1	0,990		4,19
Penyediaan alat tulis kantor	46.411.800	55.901.800	92.779.000	65.283.300	63.783.300	46.411.800	55.665.160	92.767.900	65.063.300	58.988.000	1	0,996	0,999	0,997	0,925		4,12
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.890.000	13.109.000	27.092.000	22.152.000	22.152.000	15.890.000	12.185.250	27.091.400	22.152.000	14.330.800	1	0,930	1	1	0,647		3,78
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.864.500	10.864.500	30.932.000	29.699.000	29.699.000	10.864.500	10.604.700	30.932.000	29.699.000	27.178.850	1	0,977	1	1	0,915		4,09

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	5.000.000	5.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.280.000	4.960.000	4.920.000	1	1	0,897	0,992	0,984		4,07
Penyediaan makanan dan minuman	314.340.000	283.500.000	483.700.000	387.451.020	490.920.000	302.440.000	282.360.000	476.110.000	386.565.500	490.650.000	0,962	0,997	0,984	0,998	1		4,17
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah		138.500.000	192.844.000	745.534.800	249.522.971		138.459.950	192.804.000	742.272.064	249.440.000	-	1	1	0,996	1		3,99
Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	572.395.000	547.144.000	641.992.000		448.625.000	528.420.000	532.525.600	566.578.750		438.450.000	0,923	0,973	0.883	-	0,977		3,02
Penyediaan jasa keamanan kantor					193.366.704					193.366.704	-	-	-	-	1		1,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	22.190.000					22.129.500					1	-	-	-	-		0,20
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	469.597.000					469.417.526					1	-	-	-	-		0,20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.235.745.000	1.586.095.000	2.196.714.000	1.314.250.000	2.477.850.000	1.171.280.880	1.534.896.265	2.070.370.100	1.196.604.110	2.219.827.836	0.948	0.968	0.943	0.911	0.896		3,91
Pengadaan Peralatan Gedung	206.245.000	451.225.000	448.522.000	105.550.000		203.705.000	427.830.000	401.064.858	72.100.000		0,988	0,948	0,894	0,683	-		2,72
Pembangunan gedung kantor											-	-	-	-	-		-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengadaan kendaraan dinas/operasional			565.700.000		1.571.200.000			562.500.000		1.358.240.000	-	-	0,994	-	0,865		1,86
Pengadaan Gedung Kantor		176.620.000	121.000.000	189.050.000			168.726.000	115.404.000	164.203.800		-	0,955	0,954	0,869	-		2,78
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	212.000.000	179.000.000	268.000.000	255.000.000	206.000.000	200.434.675	178.244.475	251.139.825	246.833.810	205.793.925	0,945	0,996	0,937	0,968	1		4,09
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	721.150.000	658.900.000	673.642.000	644.800.000	630.800.000	673.020.000	641.115.800	624.549.900	595.602.800	588.203.308	0,933	0,973	0,927	0,924	0,933		3,94
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	96.350.000	120.350.000	119.850.000	119.850.000	69.850.000	94.121.205	118.979.990	115.711.517	117.863.700	67.590.603	0,977	0,989	0,966	0,983	0,968		4,10
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	76.000.000	40.000.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000	20.000.000	14.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0,263	0,350	0,900	1	1	-	3,30
Peningkatan mental dan fisik aparatur	12.000.000	12.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	5.000.000	2.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0,417	0,167	1	1	1		3,25
Peningkatan SDM Aparatur	64.000.000	28.000.000	1.000.000			15.000.000	12.000.000	-			0,234	0,479	-	-	-		0,48
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	52.500.000	48.900.000	74.984.000	96.400.000	133.800.000	51.000.000	48.885.900	74.979.000	95.176.000	127.865.000	0,971	1	1	0,987	0,956		4,14

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	52.500.000	31.750.000	14.536.000	18.000.000	18.250.000	51.000.000	31.746.000	14.535.000	18.000.000	18.240.000	0,971	1	1	1	1		4,19
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		7.825.000	14.017.000	18.100.000	18.250.000		7.821.900	14.017.000	18.096.000	18.245.000	-	1	1	1	1		4,00
Penyusunan rencana kerja SKPD		9.325.000	46.431.000	60.300.000	97.300.000		9.318.000	46.427.000	59.080.000	91.380.000	-	1	1	0,980	0,939		3,92
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	-	69.150.000	60.094.200	18.600.000	20.700.000	-	64.032.722	59.697.915	18.600.000	20.700.000	-	0,926	0,993	1	1		3,92
Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah		69.150.000	60.094.200	18.600.000	20.700.000		64.032.722	59.697.915	18.600.000	20.700.000	-	0,926	0,993	1	1		3,92
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	334.970.000	28.662.500	128.714.000	350.000.000	110.000.000	230.814.900	28.662.500	60.814.000	304.070.000	102.880.000	0,689	1	0,473	0,869	0,935	-	3,41
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	103.300.000	28.662.500	128.714.000	350.000.000	110.000.000	-	28.662.500	60.814.000	304.070.000	102.880.000	-	1	0,473	0,869	0,935		3,28

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya	231.670.000					230.814.900					0,996	-	-	-	-		0,20
Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	537.685.000	562.500.000	627.052.800	-	520.000.000	512.908.950	560.984.000	622.040.009	-	457.890.000	0,954	0,997	0,992	-	0,881		3,06
Pelaksanaan Promosi dan Informasi Potensi Daerah	537.685.000	562.500.000	627.052.800		520.000.000	512.908.950	560.984.000	622.040.009		457.890.000	0,954	0,997	0,992	-	0,881		3,06

Berdasarkan Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 diatas terlihat bahwa semua target mencapai 100%. Hal ini dikearenakan Badan Penghubung Daerah berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 dan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Program dan kegiatan tersebut didukung dengan pendanaan yang memadai, sehingga realisasi anggaran rata-rata mencapai rasio 0,9 yang artinya sebagian besar program dan kegiatan yang dianggarkan dapat direalisasikan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan Badan Penghubung Daerah dalam pengembangan pelayanannya sebagai berikut :

1. Menjadikan anjungan NTB di Taman Mini Indonesia Indah sebagai replika kekayaan budaya daerah, sekaligus sebagai sarana memperkenalkan, menyebarluaskan dan mempromosikan potensi daerah.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam memberikan pelayanan prima kepada pimpinan, tamu dan masyarakat luas.
3. Mengoptimalkan peran Badan Penghubung Daerah dalam menciptakan peluang-peluang kerjasama dengan semua *stakeholder* untuk mendukung pembangunan di NTB.

Peluang Badan Peluang Badan Penghubung Daerah dalam pengembangan pelayanannya sebagai berikut :

1. Banyaknya event promosi di Jakarta untuk pengenalan potensi daerah.
2. Pemanfaatan teknologi informasi (IPTEK) dalam pelaksanaan tupoksi.
3. Minat swasta maupun lembaga lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi NTB.
4. Berkembangnya hubungan kerja dan kemitraan antar Badan Penghubung Daerah dengan berbagai lembaga pemerintahan dan non pemerintahan di Jakarta.

BAB III

PERMASALAHAN ISU STRATEGIS

BADAN PENGHUBUNG DAERAH



3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi Badan Penghubung Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Ruang lingkup dan batasan antar tugas pokok dan fungsi belum dipahami bersama, sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
2. Kuantitas dan kualitas pegawai serta manajemen organisasi yang belum memadai mengakibatkan kualitas pelayanan serta kerjasama di internal dan eksternal belum berjalan maksimal.
3. Standar harga barang dan jasa dalam Peraturan Gubernur yang tidak sesuai dengan standar harga yang berlaku di masyarakat Jakarta.
4. Peran serta dinas/instansi terkait dan kabupaten/ kota se-NTB dalam hal kerjasama penyelenggaraan kegiatan promosi pariwisata daerah di anjungan daerah NTB di TMII belum maksimal.

3.2. Telaahan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023, visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5 (lima) tahun kedepan adalah “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Badan Penghubung Daerah sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang dengan memberikan pelayanan kepada pejabat, pegawai pemerintah provinsi, pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan tugas dinas ke Jakarta, serta memfasilitasi hubungan kerja dan tugas-tugas koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota maka Badan Penghubung Daerah berkontribusi dalam pencapaian misi kedua yaitu “**NTB BERSIH DAN MELAYANI** melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi”.

Dalam mendukung pencapaian misi tersebut, Badan Penghubung Daerah juga melaksanakan tugas fasilitasi pameran IMKM, promosi dan penyampaian informasi potensi NTB, serta pentas seni budaya di Anjungan NTB pada Taman Mini Indonesia Indah. Anjungan NTB pada TMII tersebut dimanfaatkan juga sebagai sarana penyampaian informasi dan mengenalkan daerah NTB, mengingat TMII dikunjungi oleh wisatawan dari penjuru daerah termasuk wisatawan mancanegara. Dengan memaksimalkan fungsi promosi diharapkan kedepannya akan ada kerjasama dari semua perangkat daerah dan kabupaten/kota dalam memberikan data terkait pariwisata serta data yang dibutuhkan dalam berinvestasi di NTB.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Badan Penghubung Daerah, tidak ada tugas dan fungsi yang berkaitan langsung dengan kebijakan Kementerian/Lembaga teknis di pusat. Oleh karenanya, Renstra Badan Penghubung Tahun 2019-2023 tidak mengacu pada Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Badan Penghubung Daerah tidak berkaitan langsung dengan kebijakan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Oleh karenanya, Renstra Badan Penghubung Tahun 2019-2023 tidak mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis Badan Penghubung Daerah diperoleh dari hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman. Hasil analisa SWOT yakni *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman/ tantangan) pada Badan Penghubung Daerah sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan yang dimiliki Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB di Jakarta adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai tujuannya. Kekuatan merupakan modal dasar yang mesti dipelihara dan ditingkatkan diantaranya adalah:

- a. Kewenangan sebagai “duta” Pemerintah Provinsi NTB di Jakarta untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.
- b. Dukungan sumber daya manusia yang memadai, sarana prasarana berupa gedung dan bangunan dengan perlengkapan serta peralatan yang memadai.
- c. Besarnya potensi daerah yang dapat “dijual” dan dipromosikan kepada masyarakat serta investor baik dalam maupun luar negeri.
- d. Adanya website Badan Penghubung yang merupakan jendela atau pusat informasi terpadu tentang potensi daerah kabupaten/kota di NTB serta media publikasi kegiatan pimpinan daerah.
- e. Anjungan daerah Nusa Tenggara Barat di Taman Mini Indonesia Indah sebagai pintu gerbang promosi pariwisata, seni dan kebudayaan daerah NTB bagi masyarakat nasional dan internasional.
- f. Adanya kerjasama dengan pihak media yang merupakan sarana promosi potensi serta media publikasi yang dapat diakses dari mana saja di seluruh dunia.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan adalah situasi kurang mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat/gagal mencapai sasarannya. Kelemahan yang bisa menjadi penghambat untuk mencapai tujuannya antara lain:

- a. Penjabaran tugas pokok dan fungsi yang masih belum tepat.
- b. Kurang terjalin kerjasama yang optimal dengan pemerintah kabupaten/kota yang menyebabkan susahnya mendapatkan data atau informasi sebagai bahan promosi yang memadai tentang pariwisata, investasi, industri kreatif, kerajinan, kesenian dan sebagainya dari daerah secara tepat dan akurat, sehingga mengganggu kualitas pelayanan informasi pada pihak yang membutuhkan.
- c. Latar belakang pendidikan pegawai belum sesuai dengan penempatan kerja.
- d. Belum optimalnya kegiatan pembinaan, peran serta dan partisipasi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat di Jakarta dan sekitarnya.
- e. Belum maksimalnya peranan anjungan daerah NTB di Taman Mini Indonesia Indah dalam mempromosikan potensi investasi dan potensi pariwisata daerah.

3. Peluang (*Opportunities*)

Adanya perubahan pola pikir masyarakat dan sistem pemerintahan memberikan peluang atau kesempatan bagi Badan Penghubung Daerah di Jakarta untuk mengembangkan segala upaya untuk mengenalkan NTB sebagai daerah pariwisata yang memiliki potensi serta kemajuan daerah. Peluang atau kesempatan tersebut adalah:

- a. Banyaknya event promosi di Jakarta untuk pengenalan potensi daerah;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi (IPTEK) dalam pelaksanaan tupoksi;
- c. Minat swasta maupun lembaga lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- d. Berkembangnya hubungan kerja dan kemitraan antar Badan Penghubung Daerah dengan berbagai lembaga pemerintahan dan non pemerintahan di Jakarta.

4. Ancaman (*Threats*)

Selain peluang atau kesempatan yang ada, terdapat pula ancaman yang dapat menyebabkan adanya kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan. Adapun ancaman yang dihadapi adalah:

- a. Letak wisma NTB yang kurang strategis, jauh dari lokasi ASN yang ditugaskan.
- b. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja dan pelayanan pemerintah daerah.
- c. Perda RTRW Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa lokasi letak wisma NTB diperuntukkan sebagai daerah perumahan/permukiman masyarakat.

Tabel 2.8
Formulasi Strategi SWOT

	STRENGTH (S)		WEAKNESS (W)	
LINGKUNGAN INTERNAL	1	Kedudukan Badan Penghubung di ibu kota negara dan fasilitas wisma sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah	1	Latar belakang pendidikan, tingkat pengetahuan dan kemampuan pegawai belum optimal dan belum sesuai dengan penempatan kerja.

LINGKUNGAN EKSTERNAL		2	Anjungan NTB di TMII sebagai sarana promosi dan informasi potensi unggulan daerah NTB.	2	Sarana dan prasarana promosi dan informasi masih kurang memadai.
		3	Intensitas kerja yang rutin dan dukungan fasilitasi terhadap Kepala Daerah dan SKPD Provinsi NTB.	3	Belum optimalnya kegiatan pembinaan, peran serta dan partisipasi masyarakat NTB
OPPORTUNITIES (O)		SO		WO	
1	Semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap potensi wisata NTB	1	Maksimalkan peran anjungan NTB dalam mempromosikan dan menginformasikan potensi unggulan daerah NTB pada masyarakat lokal dan internasional. (S2, O1)	1	Menambah jumlah SDM yang menangani promosi dan informasi potensi unggulan daerah NTB (O1, W1)
2	Meningkatnya hubungan kerja dan kemitraan Badan Penghubung Daerah dengan berbagai lembaga pemerintahan dan non pemerintahan di Jakarta.	2	Mengoptimalkan Badan Penghubung Daerah sebagai duta NTB di Jakarta untuk menjalin kerjasama dengan kementerian/Lembaga/NGO/ stakeholders lainnya untuk mendukung pembangunan NTB. (S1,O2)	2	Pengembangan kerjasama antara Badan Penghubung Daerah dengan Badan Penghubung Daerah lainnya dalam usaha peningkatan kinerja aparatur (W1, O2)
TREATH (T)		ST		WT	
1.	Lokasi Badan Penghubung tidak sesuai Perda RTRW Provinsi DKI Jakarta	2	Penyediaan dana yang untuk membeli / menyewa gedung operasional Badan di lokasi lain. (S3, T1)	2	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Badan Penghubung Daerah. (W2, T1)

Berdasarkan hasil analisa diatas maka isu strategis Badan Penghubung Daerah adalah:

1. Optimalisasi peran dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB sebagai duta daerah di Jakarta untuk mencari informasi terkait lembaga-lembaga, swasta ataupun perorangan untuk mendukung pembangunan daerah.
2. Optimalisasi peran anjungan NTB TMII dalam promosi dan informasi potensi investasi pariwisata unggulan daerah NTB pada masyarakat lokal dan internasional di Jakarta.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN



4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung

Dalam mewujudkan pencapaian misi kedua pada RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 yaitu NTB Bersih dan Melayani melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi maka Badan Penghubung Daerah berperan dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan lembaga-lembaga negara, perwakilan-perwakilan negara serta lembaga-lembaga lain. Selain itu, Badan Penghubung Daerah juga berkontribusi dalam promosi pariwisata untuk mendukung peningkatan daya saing pariwisata dan investasi melalui pelaksanaan berbagai event di anjungan daerah NTB Taman Mini Indonesia Indah.

Sejalan dengan hal tersebut Badan penghubung menetapkan tujuan Renstra periode Tahun 2019-2023 yaitu : ***“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB”***.

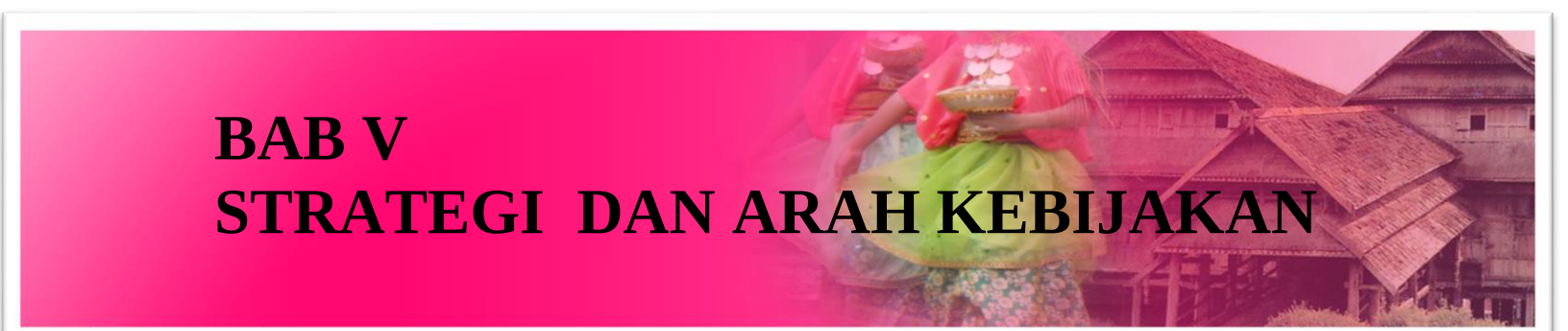
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang akan dicapai oleh Badan Penghubung Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayannan Badan Penghubung Daerah dalam hal Koordinasi, Fasilitas Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat serta Promosi Pariwisata dan Potensi Daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penginapan Wisma dan Anjungan NTB di TMII

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Priode 2019-2023**

Tujuan	Sasaran SKPD	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Kinerja Tahun Awal Capaian				Target Kinerja/Tujuan Sasaran pada Tahun Ke							
			2018		2019		2020		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	p	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB		Indikator tujuan : Tingkat kepuasan Pejabat, OPD dan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Daerah	45%	10.026.327.205	55%	11.973.032.784	60%	7.139.184.948	75%	9.306.684.520	85%	11.109.750.055	100%	14.702.849.552
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung Daerah dalam hal Koordinasi, Fasilitasi Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat serta Promosi Pariwisata dan Potensi Daerah	Indikator Sasaran 1: Tingkat kepuasan pelayanan Pejabat, OPD terhadap Badan Penghubung Daerah NTB	45%	9.703.657.205	55%	11.412.262.784	65%	6.121.178.748	75%	8.211.965.786	85%	9.985.031.321	100%	13.252.061.552
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan penginapan Wisma dan Anjungan NTB di TMII	Indikator Sasaran 2 : Tingkat kepuasan pelayanan pengunjung Wisma dan Anjungan NTB di TMII	45%	322.670.000	55%	560.770.000	65%	1.018.006.200	75%	1.094.718.734	85%	1.124.718.734	100%	1.450.788.000



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, maka strategi yang dilakukan oleh Badan Penghubung Daerah adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana.
4. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait urusan antar lembaga yang dapat difasilitasi.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait agenda dan promosi budaya di anjungan NTB TMII

4.2. Kebijakan

Guna mendukung rumusan strategi yang telah disusun, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung dalam memfasilitasi pimpinan daerah dan *stakeholder* lainnya;
2. Optimalisasinya pelaksanaan tugas fungsi Badan Penghubung Prov. NTB dalam pelayanan publik di anjungan NTB TMII.

**Tabel 5.1 Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Penghubung NTB tahun 2019-2023**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung Provinsi NTB	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubyung dalam hal Koordinasi, Fasilitasi Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat serta Promosi Pariwisata dan Potensi Daerah NTB Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan penginapan Wisma dan Anjungan NTB di TMII	a. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia c. Meningkatkan sarana dan prasarana d. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait urusan antar lembaga yang dapat difasilitasi e. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait agenda dan promosi budaya di anjungan NTB di TMII	1. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung dalam memfasilitasi pimpinan daerah dan <i>stakeholder</i> lainnya 2. Optimalisasi pelaksanaan tugas fungsi Badan Penghubung Prov. NTB dalam pelayanan publik di anjungan NTB TMII.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai indikator kinerja Badan Penghubung Provinsi NTB melaksanakan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Program dan kegiatan tersebut terdiri 7 program dengan 28 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat.
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- e. Penyediaan alat tulis kantor.
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor.
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- i. Penyediaan makanan dan minuman.
- j. Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah.
- k. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran.
- l. Penyelarasan program pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota
- m. Penyediaan jasa keamanan kantor.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :

- a. Pengadaan peralatan gedung kantor.
- b. Pembangunan gedung kantor.
- c. Pengadaan kendaraan dinas operasional.
- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :

- a. Pembinaan mental dan fisik aparatur
- b. Peningkatan SDM aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan:

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- c. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan :

- a. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat; pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan :

- a. Peningkatan manajemen aset/barang daerah.

7. Program Koordinasi Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan :

- a. Jumlah kunjungan wisatawan pada anjungan daerah NTB di Jakarta
- b. Frekuensi event seni dan budaya skala nasional pada Anjungan NTB di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta.

Penetapan program dan kegiatan disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penajaman tolak ukur kinerja, seperti tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2019		2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung Provinsi NTB	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan wisma NTB													
		4.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.582.641.275								
		4.01.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia	400 surat	18.324.000	500 surat	21.000.000						
		4.01.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan Internet yang tersedia (paket)	4 rek	453.653.613	4 rek	547.339.800						
		4.01.05.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga administrasi keuangan.	15 orang	111.540.000	15 orang	139.790.000						
		4.01.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya Jasa tenaga kebersihan	26 orang	868.441.616	26 orang	879.043.816						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2019		2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		4.01.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor tersedia.	15 jenis	58.988.000	15 jenis	84.522.295						
		4.01.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan kegiatan penggandaan	13 dokumen	14.330.800	13 dokumen							
		4.01.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sarana instalasi listrik yang terpasang	50 jenis	27.178.850	25 dokumen	30.199.000						
		4.01.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 rek	4.920.000	5 rek	6.000.000						
		4.01.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman yang disediakan	313 orang	490.650.000	300 Orang	384.210.000						
		4.01.05.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	210 kali	249.440.000	200 kali	222.999.000						
		4.01.05.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tenaga administrasi dan teknis perkantoran tersedia	22 Orang	438.450.000	22 Orang	458.240.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2019		2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		4.01.05.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Kegiatan koordinasi dan konsultasi di dalam daerah (org/keg)	110 kali	653.357.692	110 kali	538.699.999						
		4.01.05.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tenaga Keamanan Kantor yang tersedia	4 Orang	193.366.704	4 Orang	198.066.595						
		4.01.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur		2.218.627.836		1.565.903.980						
		4.01.05.01.02.01	Pengadaan peralatan gedung	Peralatan gedung kantor yang dibeli	-	-	20 Unit	200.000.000						
		4.01.05.01.02.02	Pembangunan gedung kantor	Terpenuhinya Gedung Perkantoran	-	-	1 Paket	511.200.000						
		4.01.05.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Terpenuhinya jumlah kendaraan dinas/ operasional	3 unit	1.357.040.000	6 Unit	16.000.000						
		4.01.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang dipelihara	2 unit	205.793.925	4 Unit	270.681.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2019		2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		4.01.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas operasional yang dipelihara	20 unit	588.203.308	20 unit	458.175.000						
		4.01.05.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	30 unit	67.590.603	30 unit	109.847.980						
		4.01.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		9.000.000		9.264.047						
		4.01.05.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Sumber Daya aparatur yang terbina.	24 orang	9.000.000	41 orang	9.264.047						
		4.01.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD		127.865.000		119.845.750						
		4.01.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Tersusunnya laporan perencanaan dan capaian kinerja OPD	1 dokumen	18.240.000	1 dokumen	20.207.750						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2019		2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			kinerja SKPD											
		4.01.05.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terselenggaranya kegiatan penyusunan dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	18.245.000	1 dokumen	20.202.000						
		4.01.05.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya dokumen laporan akhir tahun	4 dokumen	91.380.000	4 dokumen	79.436.000						
		4.01.05.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD		20.700.000		20.694.000						
		4.01.05.01.01.07	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Tersusunnya dokumen aset BMD	1 dokumen	20.700.000	1 dokumen	20.694.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2019		2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		4.01.05.01.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah		102.880.000		153.333.984						
		4.01.05.01.16.01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Terselenggaranya dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa & pemuda NTB yang ada di Jakarta dan sekitarnya	4 kegiatan	102.880.000	4 kegiatan	153.333.984						
		4.01.05.01.55	Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB di Jakarta		457.890.000		871.316.734						
		4.01.05.01.55.01	Pelaksanaan Promosi dan Informasi Potensi Daerah	Terselenggaranya kegiatan penyebaran informasi dan promosi potensi daerah Nusa Tenggara Barat	8 Event	457.890.000	8 Event	871.316.734						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2019		2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				di wilayah Jakarta dan sekitarnya.										
		4.01.05.55.02	Evaluasi efektifitas pelaksanaan promosi dan informasi pariwisata nusantara	Tersusunnya dokumen Evaluasi efektifitas pelaksanaan promosi dan informasi pariwisata nusantara	0	0	1 Paket	100.000.000						

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Badan Penghubung Provinsi NTB Periode Tahun 2021-2023. Program, kegiatan, dan sub kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.2.
Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan 2021 – 2023 Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	-15
Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung Provinsi NTB	Sasaran 1 :				75%	9,306,684,520	85%	11,109,750,055	100%	14,702,848,552	100%	35,119,283,127		
	Meningkatnya kualitas pelayanan wisma NTB													
		5.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase kepuasan pengunjung wisma NTB	75%	8,211,965,786	85%	9,985,031,321	100%	13,252,060,552	100%	31,449,057,659		
		5.07.01.1.01	Kegiatan 1 :											
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah	100,00%	88,647,000	100,00%	346,071,600	100,00%	693,421,600	100,00%	1,128,140,200		
		5.07.01.1.01 .01	Sub kegiatan 1.1:											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	-15
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1 dokumen	10,684,600	1 dokumen	65,000,000	2 dokumen	97,000,000		172,684,600		
		5.07.01.1.01 .02	Sub kegiatan 1.2 :											
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	20,679,600	1 dokumen	62,038,800	1 dokumen	124,077,600		206,796,000		
		5.07.01.1.01 .03	Sub kegiatan 1.3 :											
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	21,599,600	1 dokumen	64,798,800	1 dokumen	129,597,600		215,996,000		
		5.07.01.1.01 .04	Sub kegiatan 1.4 :											
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	6,022,000	1 dokumen	36,132,000	1 dokumen	72,264,000		114,418,000		
		5.07.01.1.01 .05	Sub kegiatan 1.5 :											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	-15
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKP	Jumlah dokumen	1 dokumen	6,849,600	1 dokumen	41,097,600	1 dokumen	82,195,200		130,142,400		
		5.07.01.1.01 .06	Sub kegiatan 1.6 :											
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	2 dokumen	14,242,000	2 dokumen	42,726,000	2 dokumen	85,452,000		142,420,000		
		5.07.01.1.01 .07	Sub kegiatan 1.7 :											
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1 dokumen	8,569,600	1 dokumen	34,278,400	1 dokumen	102,835,200		145,683,200		
		5.07.01.1.02	Kegiatan 2 :											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggu ng Jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	-15	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian jenis pelayanan administrasi keuangan	97,99%	4,834,916,810	97,99%	7,297,847,415	97,99%	10,978,548,923		23,111,313,148			
		5.07.01.1.02 .01	Sub kegiatan 2.1:												
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN	42 orang	4,804,602,010	42 orang	7,206,903,015	42 orang	10,810,354,522.50		22,821,859,548			
		5.07.01.1.02 .02	Sub kegiatan 2.2:												
			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen	1 dokumen	7,634,600	1 dokumen	22,903,800	1 dokumen	45,807,600		76,346,000			
		5.07.01.1.02 .04	Sub kegiatan 2.3:												
			Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	7,695,600	1 dokumen	23,086,800	1 dokumen	46,173,600		76,956,000			
		5.07.01.1.02 .05	Sub kegiatan 2.4:												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	-15
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	9,129,600	1 dokumen	27,388,800	1 dokumen	41,083,200.0		77,601,600		
		5.07.01.1.02.07	Sub kegiatan 2.5:											
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	5,855,000	1 dokumen	17,565,000	1 dokumen	35,130,000		58,550,000		
		5.07.01.1.03	Kegiatan 3 :											
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian jenis pelayanan administrasi BMD	100%	7,653,600	100%	30,614,400	100%	61,228,800	100%	99,496,800		
		5.07.01.1.03.01	Sub kegiatan 3.1:											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggu ng Jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	-15	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	7,653,600	1 dokumen	30,614,400	1 dokumen	61,228,800		99,496,800			
		5.07.01.1.06	Kegiatan 4 :												
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian jenis pelayanan administrasi umum	100%	844,376,200	100%	1,488,360,100	100%	1,958,520,200		4,291,256,500			
		5.07.01.1.06 .01	Sub kegiatan 3.1:												
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor	Jumlah instalasi listrik	7 jenis	25,808,000	7 jenis	38,712,000.0	7 jenis	77,424,000.0		141,944,000			
		5.07.01.1.06 .02	Sub kegiatan 3.2:												
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 jenis	32,100,000	12 jenis	64,200,000	12 jenis	128,400,000		224,700,000			
		5.07.01.1.06 .04	Sub kegiatan 3.3:												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	-15
		5.07.01.1.06.05	Penyediaan bahan logistik kantor	Bahan logistik kantor yang tersedia		25,956,500		51,913,000		103,826,000		181,695,500		
			Sub kegiatan 3.4:											
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	2 jenis	7,111,700	2 jenis	21,335,100	2 jenis	42,670,200		71,117,000		
		5.07.01.1.06.06	Sub kegiatan 3.5:											
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	2 bacaan	23,400,000	5 bacaan	70,200,000	5 bacaan	70,200,000		163,800,000		
		5.07.01.1.06.08	Sub kegiatan 3.6:											
			Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu	100 orang	294,000,000	200 orang	588,000,000	300 orang	882,000,000.0		1,764,000,000		
		5.07.01.1.06.09	Sub kegiatan 3.7:											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	-15
			Penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat	36 kali	436,000,000	54 kali	654,000,000.0	54 kali	654,000,000.0		1,744,000,000		
		5.07.01.1.07	Kegiatan 4 :											
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaaan barang milik daerah	100%	20,000,000	100%	1,454,418,312	100%	1,571,199,999		3,045,618,311		
		5.07.01.1.07 .02	Sub kegiatan 4.1:											
			Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan	1 unit	20,000,000	3 unit	1,454,418,312	3 unit	1,571,199,999		3,045,618,311		
		5.07.01.1.08	Kegiatan 5 :											
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang	100%	2,656,156,000	100%	3,086,868,000	100%	4,379,952,000		10,122,976,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggu ng Jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	-15	
		5.07.01.1.08 .01	Sub kegiatan 5.1:												
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	500 surat	101,960,000	500 surat	122,352,000	500 surat	183,528,000		407,840,000			
		5.07.01.1.08 .02	Sub kegiatan 5.2:												
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening	4 rek	551,016,000	4 rek	560,700,000	4 rek	590,700,000		1,702,416,000			
		5.07.01.1.08 .04	Sub kegiatan 5.3:												
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	31 orang	2,003,180,000	31 orang	2,403,816,000.0	31 orang	3,605,724,000.0		8,012,720,000			
		5.07.01.1.09	Kegiatan 6 :												
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	1,100,578,000	100%	1,627,477,600	100%	1,818,787,120		4,546,842,720			
		5.07.01.1.09 .01	Sub kegiatan 6.1:												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	-15
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan	23 unit	383,480,000	23 unit	766,960,000	23 unit	766,960,000		1,917,400,000		
		5.07.01.1.09.07	Sub kegiatan 6.2:											
			Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah asset tetap	31 unit	53,350,000	31 unit	64,020,000.0	31 unit	96,030,000.0		213,400,000		
		5.07.01.1.09.09	Sub kegiatan 6.3:											
			Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung	2 gedung	663,748,000	2 gedung	796,497,600.0	2 gedung	955,797,120.0		2,416,042,720		
	Sasaran 2 :	Indikator sasaran 2.2 :												
	Meningkatnya kualitas pelayanan anjungan NTB di TMII	Tingkat kepuasan pengunjung anjungan NTB		Persentase kepuasan pengunjung anjungan NTB	75 %	1,024,316,734	85 %	1,229,180,081	100 %	1,475,016,097	100 %	3,728,512,912		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	-15
			Program 2 : Program Pelayanan Penghubung	Persentase kepuasan pengunjung anjungan NTB	75 %	1,024,316,734	85 %	1,229,180,081	100 %	1,475,016,097	100 %	3,728,512,912		
			Kegiatan 2.1 :											
			Pelaksanaan pelayanan penghubung			1,024,316,734		1,229,180,081		1,475,016,097		3,728,512,911.76		
			Sub kegiatan 2.1.1 :											
			Peningkatan fasilitas promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya	Jumlah promosi dan produk unggulan	8 event	457,890,000	10 event	549,468,000.0	12 event	659,361,600.0		1,666,719,600		
			Sub kegiatan 2..1.2 :											
			Kegiatan fasilitasi produk unggulan dan pelestarian seni budaya	Jumlah pameran produk unggulan	8 event	413,426,734	10 event	496,112,080.80	12 event	595,334,496.96		1,504,873,311.76		
			Sub kegiatan 2..1.3 :											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	-15
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	Jumlah dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan anggota organisasi sosial dan anggota kemasyarakatan	3 pertemuan	153,000,000	3 pertemuan	183,600,000.0	5 pertemuan	220,320,000.0		556,920,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN



Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Penetapan indikator kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 7.1

Penetapan Indikator Kinerja Badan Penghubung Prov.NTB

No	Indikator Kinerja	Kondisi awal 2018	Target Capaian Setiap Tahun Ke				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat kepuasan tamu terhadap pelayanan wisma NTB	45 %	55%	65%	75%	85 %	100%
2	Tingkat kepuasan pengunjung ke Anjungan NTB TMII	45 %	55%	65%	75%	85 %	100%

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan sebagaimana tabel di atas didapat dengan formula sebagai berikut :

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung

=

Jumlah tamu yang puas terhadap pelayanan wisma NTB

Jumlah tamu yang dilayani di wisma NTB

X

100%

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Anjungan Daerah NTB di TMII

=

Jumlah tamu yang puas terhadap pelayanan Anjungan NTB

Jumlah tamu yang dilayani di Anjungan NTB

X

100%

BAB VIII

PENUTUP



Dokumen perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam dokumen revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019- 2023 yang merupakan acuan dalam rangka pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang terdiri dari :

1. Tujuan
2. Sasaran
3. Strategi dan arah kebijakan
4. Program dan kegiatan
5. Indikator kinerja

Dalam rangka mengimplementasi Revisi RENSTRA Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Revisi RENSTRA Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 serta telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
2. Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 - 2023 dengan berpedoman pada Revisi RENSTRA Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 - 2023 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Revisi RENSTRA Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk rencana jangka menengah selama 5 (lima) tahun, yang diawali dengan rencana tahunan.
4. Diupayakan bahwa pelaksanaan dari rencana secara implemetasi harus memperhatikan pelayanan publik, serta berbasis biaya yang memperhatikan hasil dan menggunakan biaya secara efektif dan efisien.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan Revisi RENSTRA Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 ini sangat tergantung dari

kesepahaman, kesepakatan dan komitmen seluruh aparatur karena akan menentukan keberhasilan program kegiatan serta sasaran yang ditetapkan. Dengan demikian, dokumen Revisi Renstra ini bukan hanya sebagai dokumen administrasi, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh *stakeholder* sesuai tujuan dan sasaran Badan Penghubung Provinsi NTB.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Revisi Renstra ini harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga seluruh komponen Badan penghubung Provinsi NTB harus ikut berperan dalam pencapaian tujuan organisasi. Sejalan dengan itu yang perlu menjadi perhatian juga adalah kapasitas Sumber Daya Manusia.

Akhir kata semoga Revisi Rensta Badan penghubung Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dapat dilaksanakan dengan baik dan konsisten sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana telah ditetapkan.

Jakarta,

2020

Kepala Badan Penghubung Daerah
Provinsi Nusa Tenggara barat,



SAHRIRROHMAN, S.Sos,M.AP
NIP.196912151990031011